

ABSTRAK

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh sangat penting artinya dalam rangka memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Kehadiran serikat pekerja/buruh pun diharapkan menjadi penyeimbang posisi pekerja/buruh dengan pemberi kerja. Melalui keterwakilan serikat pekerja/buruh diharapkan aspirasi pekerja/buruh bisa disampaikan kepada pemberi kerja. Sehingga pembentukan maupun kehadiran dari serikat pekerja/buruh tersebut tidak boleh dihalang-halangi sedikitpun baik itu dari pengusaha selaku pemberi kerja maupun dari pemerintah. Permasalahannya adalah bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh ketika merasa haknya dihalangi untuk membentuk serikat pekerja/buruh. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian *legal research*, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dalam hal ini kepala Dinsosnaker Kota Sibolga diduga telah melanggar hak dari pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/buruh, yakni dengan cara melakukan pembatalan pencatatan yang telah dilakukan, serta tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan pekerja/buruh.

Kata kunci: Serika pekerja, hak pekerja, kepala Dinsosnaker.

ABSTRACT

Labor Union is an organization that is established by & represents the workers inside & outside of the company, with the principles of freedom, openness, independence, democracy, and responsibility to fight for, defend, and protect the interests of workers as well as improving the welfare of the workers & their families. The presence of Labor Union is very important to fight for, defend, and protect the interests of workers as well as improving the welfare of the workers. The presence of Labor Union is expected to balance out the position of workers and employers. Through the representation of Labor Union, the aspirations of the workers will be communicated to employers and the establishment of the union should not be hindered whether by the employers or government. But the difficulty that often being faced by Labor Union is finding the lawsuit to be filed in case of a hindrance to its establishment. Research type in this thesis is legal research and the approaches chosen for this topic are statutes, conceptual, and case approach. Based on the findings of this research, the action of the government, in this case, the head of Sibolga City Social & Labour Department, has been suspected as a violation of worker's right to establish Labor Union by revoking the registrations & not implementing the mutual agreement between the government and the workers.

Keywords: Labor Union, worker rights, head of Social & Labour Department.

MOTTO

Selagi ada kesempatan lakukan, jangan takut gagal
karena berhasil itu berani beresiko dan pengorbanan.

DAFTAR PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor:
KEP.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan Forum Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan pada Kawasan
Ekonomi Khusus

UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung No. 812 K/Pid.Sus/2015